

# Misiologi dalam Problematika Agama di Masyarakat Demokratis Multikultural

DOI: <https://doi.org/10.47543/efata.v10i1.130>

Paulus Eko Kristianto

Fakultas Teologi, Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta

Correspondence: [paulusekokristianto12@gmail.com](mailto:paulusekokristianto12@gmail.com)

**Abstract:** Religious problems in democratic societies are commonplace and have occurred since before the formation of democracy. However, the color of the problematic discussion is different. What are the colors of religious problems in a multicultural democratic society? This article tries to map it through library research methods on books and journals to build a meeting with the construction of religion and public space in a multicultural democratic society, the rationality of faith, and the church in action. These meetings led to efforts to construct missiology. Missiology is expected to provide a bright and straightforward way to see various problems by discussing the call of religion to proclaim the Kingdom of God rather than just standing and focusing only on the issues of religion and its practice itself.

Keywords: democratic society; missiology; multicultural public space; religious problems

**Abstrak:** Problematika agama dalam masyarakat demokratis menjadi hal biasa dan sudah terjadi sejak sebelum terbentuknya demokrasi. Walau begitu, warna diskusi problematika itu berbeda-beda. Bagaimana warna problematika agama di masyarakat demokratis multikultural? Artikel ini mencoba memetakannya melalui metode penelitian pustaka terhadap buku dan jurnal guna membangun pertemuannya dengan konstruksi agama dan ruang publik dalam masyarakat demokratis multikultural, rasionalitas iman, dan gereja dalam aksi. Pertemuan-pertemuan tersebut bermuara pada upaya mengonstruksi misiologis. Misiologi diharapkan memberikan jalan terang dan jernih melihat beragam problematika dengan membahas panggilan agama yang mewartakan Kerajaan Allah, bukan semata berdiri dan berfokus hanya pada problematika agama dan praktiknya itu sendiri.

Kata kunci: masyarakat demokratis; misiologi; problematika agama; ruang publik multikultural

## PENDAHULUAN

Sesuai dengan etimologi kata “demokrasi”, ajaran klasik tentang demokrasi mengatakan bahwa rakyatlah yang berdaulat dan memerintah sendiri. Bagi Adrianus Sunarko, ajaran klasik demikian harus diterjemahkan dalam konteks Indonesia yang berarti sebuah masyarakat yang kompleks, berjumlah besar dan bersifat plural, dengan sejarah yang khas, di era globalisasi.<sup>1</sup> Kemudian, Sunarko menuangkannya ke dalam empat hal. Pertama, dalam konteks seperti itu pantas diperhatikan bahwa demokrasi tidak boleh dimengerti sebatas pada pemilihan umum saja. Kedua, jelas sekali bahwa pluralitas merupakan ciri masyarakat Indonesia yang berpengaruh besar juga bagi pengembangan demokrasi. Ketiga, dari sejarah bangsa, pelajaran berharga tidak boleh dilupakan bahwa demokrasi juga meliputi aspek ekonomi. Keempat, kalau agama hendak berperan aktif dalam demokratisasi, maka

<sup>1</sup> Adrianus Sunarko, “Kristen-Katolik: Gereja Katolik Tentang Demokrasi,” in *Agama Dan Demokratisasi: Kasus Indonesia*, ed. Simon Petrus Lili Tjahjadi (Yogyakarta: Kanisius, 2011), 103.

sejumlah hal penting tersebut perlu diperhatikan.<sup>2</sup> Dari keempat pemahaman demikian, saya menimbang agama dan demokrasi turut mengandung relasi yang perlu ditinjau.

Agama dan demokrasi sudah menjadi relasi diskusi tersendiri sejak lama. Setidaknya, hal ini tercermin dalam kecenderungan yang berlainan pada gerakan Kristiani (konservatif, reformis, dan radikal) dan evolusi demokrasi (liberal dan sosial).<sup>3</sup> Mengikuti analisis dari John Howard Yoder, John W. De Gruchy menyimpulkan kecenderungan ini rupanya berakar dari adanya peran gereja Barat terhadap demokrasi.<sup>4</sup> Meski demikian, ini tidak bisa ditalan begitu saja karena bagaimanapun gereja ada bukan untuk memberi etos bagi demokrasi atau segala bentuk organisasi, atau bahkan menjadi bagian gerakan politik, melainkan menjadi ruang pewartaan.<sup>5</sup> Wacana ini berangkat dari adanya pendasaran dua teologi. Pertama, tradisi kenabian sebagaimana bertumpu pada pembebasan Israel dari perbudakan di Mesir dan keberpihakan Allah pada kaum miskin dan orang tertindas.<sup>6</sup> Kedua, keyakinan kristiani bahwa Allah yang dinyatakan Kristus bersifat Trinitas yang memungkinkan kehadiran baru diskusi demokrasi melalui melampaui keterpisahan antara individualisme dan kolektivisme yang menyulitkan perdebatan antara liberalisme dan sosialisme.<sup>7</sup>

Setelah berjalannya waktu begitu lama, apakah perdebatan ini masih berlangsung? Rupanya, problematika agama di masyarakat demokratis multikultural menjadi pergumulan tersendiri. Mengenang refleksi kegiatan selama periode 2003-2006, komisi hubungan antaragama dan kepercayaan (komisi HAK) Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menyebutkan persoalan masuknya agama formal dalam ruang-ruang kenegaraan sebagai tanda krisis besar bangsa.<sup>8</sup> Sebenarnya, pemahaman ini mengarah pada upaya memasukkan urusan formal keagamaan ke dalam aturan negara dan ahli-ahli agama akan menjadi kolaborator kekuasaan untuk menindas rakyat yang mana seolah-olah jika ayat agama masuk ke ruang publik maka semua menjadi beres. Ini juga menimbulkan persoalan di mana berpotensi terjadi penyalahgunaan nilai-nilai agama yang dapat menjadi biang ketakutan jika agama terlalu masuk dan bergumul dalam kekuasaan.<sup>9</sup>

Wahid Institute memaparkan adanya gejala terlalu banyak campur tangan agama dalam politik berupa empat hal. Pertama, jenis perda yang terkait dengan *fashion* dan mode pakaian lainnya seperti keharusan memakai jilbab dan jenis pakaian lainnya di tempat-tempat tertentu. Perda ini jelas sangat condong ke Islam sehingga orang dapat mudah mengidentifikasi sebagai perda Syariat Islam.<sup>10</sup> Kedua, jenis perda yang terkait dengan keterampilan beragama, seperti keharusan bisa baca tulis Al-Quran sebagaimana terdapat di Indramayu dan Bulukumba (Sulsel). Perda ini dikaitkan dengan aktivitas lain, contohnya menjadi syarat untuk menikah, naik pangkat bagi pegawai negeri sipil, dan memperoleh pelayanan publik.<sup>11</sup> Ketiga, jenis perda yang terkait dengan pemungutan dana sosial dari masyarakat melalui perda zakat, infak, dan shadaqah. Dalam kasus di Lombok Timur, perda ini menuai

---

<sup>2</sup> Sunarko, "Kristen-Katolik: Gereja Katolik Tentang Demokrasi."

<sup>3</sup> John W. De Gruchy, *Agama Kristen Dan Demokrasi: Suatu Teologi Bagi Tata Dunia Yang Adil* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), 8.

<sup>4</sup> Gruchy, *Agama Kristen Dan Demokrasi: Suatu Teologi Bagi Tata Dunia Yang Adil*, 9.

<sup>5</sup> Gruchy, *Agama Kristen Dan Demokrasi: Suatu Teologi Bagi Tata Dunia Yang Adil*, 11.

<sup>6</sup> Gruchy, *Agama Kristen Dan Demokrasi: Suatu Teologi Bagi Tata Dunia Yang Adil*, 12.

<sup>7</sup> Gruchy, *Agama Kristen Dan Demokrasi: Suatu Teologi Bagi Tata Dunia Yang Adil*, 13.

<sup>8</sup> Andrianus Sunarko, "Rasionalitas Iman Dan Masyarakat Demokratis Multikultural," in *Multikulturalisme: Kekayaan Dan Tantangannya Di Indonesia*, ed. A. Eddy Kristiyanto and William Chang (Jakarta: Obor, 2014), 23.

<sup>9</sup> Sunarko, "Rasionalitas Iman Dan Masyarakat Demokratis Multikultural," 23.

<sup>10</sup> Sunarko, "Rasionalitas Iman Dan Masyarakat Demokratis Multikultural," 24.

<sup>11</sup> Sunarko, "Rasionalitas Iman Dan Masyarakat Demokratis Multikultural," 24.

protes dari guru-guru. Mereka menolak zakat profesi dengan memotong sebanyak 2,5% setiap bulan.<sup>12</sup> Keempat, hal yang cukup mengkhawatirkan dari fenomena perda syariat adalah respons daerah-daerah lain yang mayoritas Kristen. Katakanlah di Manokwari sebagaimana yang membuat raperda Injili, adanya larangan perempuan Islam memakai jilbab di tempat publik dikarenakan sangat mengganggu suasana batin.<sup>13</sup>

Berpijak pada situasi demokrasi demikian, saya menimbang refleksi teologi terhadapnya menjadi urgensi tersendiri guna memberikan kontribusi keilmuan. Penelitian Aseng Yulias Samongilailai menunjukkan hasil refleksi teologisnya, bahwa visi profetis yang bisa dikembangkan berkenaan demokrasi melalui gagasan John W. De Gruchy sebagaimana membahas biarlah keadilan bergulung seperti air, Yesus dan Kerajaan Allah, ekklesia Kristen, kemudian diimplementasikan ke bahasan shalom dan keadilan dan menghadirkan Kerajaan Allah.<sup>14</sup> Penelitian Samongilailai menolong munculnya pemahaman operasional demokrasi yang profetis. Bagi saya, ini berbicara merasuknya Kristen pada demokrasi di tataran praktik Kekristenan. Meskipun saya sendiri menimbang demokrasi ini tidak otomatis terselenggara di Indonesia mengingat demokrasi Indonesia tidak berbasis agama. Kemudian melalui penelitiannya, Yoshua Budiman Harahap mengingatkan gereja perlu menyuarakan refleksi teologi berkenaan demokrasi dengan menyinggung beberapa hal yang sejatinya mengakar dari identitas gereja dan iman Kristen itu sendiri yaitu perjuangan akan kesetaraan (*equality*), tanggung jawab moral, dan identitas diri yang utuh.<sup>15</sup> Sama halnya dengan Samongilailai, Harahap tidak merekonstruksi demokrasi, melainkan membahas tataran praktik demokrasi dari segi Kekristenan. Saya bisa memahami bahwa refleksi teologi berkenaan demokrasi memang sulit diarusutamakan di segi konstruksi demokrasi itu sendiri dikarenakan Indonesia bukan negara berbasis Kristen, melainkan sekular, khususnya Pancasila. Kalaupun diarusutamakan, ia hanya bergerak di wilayah praktik penerapan demokrasi dari segi Kekristenan.

Beragam penelitian refleksi teologi terhadap isu demokrasi memang sudah dibahas sebagaimana sudah terurai di bagian sebelumnya. Namun melalui artikel ini, saya mencoba membahasnya dari segi misiologi. Lantas, apa itu misiologi? J. Andrew Kirk mendefinisikan misiologi merupakan suatu disiplin ilmu yang berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang timbul ketika orang beriman berusaha memahami dan memenuhi maksud Allah di dunia sebagaimana hal itu dinyatakan dalam pelayanan Yesus Kristus.<sup>16</sup> Kemudian, misiologi turut dipahami sebagai suatu refleksi kritis tentang sikap dan tindakan yang dipakai orang-orang Kristen dalam menjalankan mandat misioner. Tugas tersebut adalah mengesahkan, mengoreksi, dan menegaskan seluruh praktik misi berdasarkan landasan yang lebih baik.<sup>17</sup> Definisi ini memungkinkan saya untuk menariknya pada upaya membangun konstruksi misiologi dalam problematika agama di masyarakat demokratis multikultural. Ini didasarkan bahwa misiologi merupakan bentuk refleksi menjalankan mandat misioner di berbagai problematika yang mana dapat ditarik ke demikian. Oleh karenanya, pertanyaan

---

<sup>12</sup> Sunarko, "Rasionalitas Iman Dan Masyarakat Demokratis Multikultural," 24.

<sup>13</sup> Sunarko, "Rasionalitas Iman Dan Masyarakat Demokratis Multikultural," 24.

<sup>14</sup> Aseng Yulias Samongilailai, "Visi Profetis Kehidupan Sosial Umat Kristen Dalam Demokrasi Menurut John W. De Gruchy," *Epigraphe: Jurnal Teologi dan Pelayanan Kristiani* 3, no. 2 (2019).

<sup>15</sup> Yoshua Budiman Harahap, "Demo(n)s Dan Kratos: Kritik Terhadap Praktik Demokrasi Dari Kacamata Kekristenan," *Kenosis: Jurnal Kajian Teologi* 6, no. 2 (2020).

<sup>16</sup> J. Andrew Kirk, *Apa Itu Misi?: Suatu Penelusuran Teologis* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999), 22.

<sup>17</sup> Kirk, *Apa Itu Misi?: Suatu Penelusuran Teologis*, 22.

penelitian yang dipakai sebagai acuan artikel ini yaitu bagaimana konstruksi misiologi dalam problematika agama di masyarakat demokratis multikultural?

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini ingin menjawab pertanyaan penelitian bagaimana konstruksi misiologi dalam problematika agama di masyarakat demokratis multikultural. Upaya ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kajian pustaka terhadap buku dan jurnal yang berbicara tentang demokrasi, hubungan agama dan ruang publik, dan problematika masyarakat demokratis multikultural. Pada prosesnya, penulis memeriksa hasil penelitian terdahulu yang bersinggungan dengannya dan berbagai teori pendukung yang membahasnya. Berbagai teori tersebut coba dibangun melalui bahasan agama dan ruang publik dalam masyarakat demokratis multikultural, rasionalitas iman, gereja dalam aksi, dan bangunan misiologi dalam rasionalitas iman dan masyarakat demokratis multikultural.

## **PEMBAHASAN**

### **Agama dan Ruang Publik dalam Masyarakat Demokratis Multikultural**

Demokrasi multikultural memang bukan dimaksudkan sebagai bentuk atau karakteristik demokrasi yang baru. Demokrasi multikultural merupakan kesadaran adanya demokrasi dalam kesadaran atau penerimaan pada multikultural sebagaimana karakteristik masyarakat Indonesia. Yongky Gigih Prasisko menunjukkan demokrasi mengedepankan mendorong kebijakan melestarikan, melindungi, dan mengembangkan kebudayaan di Indonesia.<sup>18</sup> Pola ini dilakukan melalui pembinaan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan.<sup>19</sup> Saya sepakat dengan alternatif yang ditawarkan Prasisko guna memperkokoh multikultural melalui demokrasi. Kemudian, Nur Laili Fitriyah menunjukkan demokrasi multikultural turut terintegrasi dalam pembelajaran sehingga ia menamainya membangun pembelajaran demokratis berwawasan multikultural. Pembelajaran ini ditawarkannya dengan berorientasi normatif; dilaksanakan oleh kalangan profesional; penanaman nilai, kultur, dan kebiasaan-kebiasaan dilakukan melalui binaan sang guru; pengambilan keputusan dilakukan bersama.<sup>20</sup> Dari penelitian Fitriyah, ada gambaran bahwa demokrasi multikultural bukan sebatas sistem demokrasi, melainkan nilai yang perlu merasuk dan diintegrasikan ke segenap bidang, termasuk salah satunya pembelajaran.

Setelah mempelajari ruang lingkup demokrasi multikultural, lalu bagaimana relasi agama dan ruang publik dalam masyarakat demokrasi multikultural tersebut. Pertanyaan tersebut menjadi acuan penulisan bagian ini. Bila dilacak dari penelitian terdahulu, diskusi agama dan ruang publik dalam masyarakat demokratis multikultural sudah diangkat Adrianus Sunarko dengan mengingatkan jasa para pendiri bangsa. Bangsa Indonesia pernah berhadapan dengan tugas meletakkan tatanan dasar kehidupan kenegaraan bersama melalui diskusi yang difasilitasi oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada bulan Mei sampai Juli 1945. Diskusi itu mengandung dua pandangan berbeda dan saling berhadapan yaitu antara menjadikan agama mayoritas sebagai tatanan dasar negara dan yang lain murni kebangsaan. Dua pandangan itu terbilang masuk akal dengan pertimbangan masing-masing. Perbedaan itu bisa dileburkan melalui

---

<sup>18</sup> Yongky Gigih Prasisko, "Demokrasi Indonesia Dalam Masyarakat Multikultural," *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter* 3, no. 1 (2019).

<sup>19</sup> Prasisko, "Demokrasi Indonesia Dalam Masyarakat Multikultural."

<sup>20</sup> Nur Laili Fitriyah, "Membangun Pembelajaran Demokratis Berwawasan Multikultural," *Madrasah: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Madrasah* 5, no. 1 (2012).

kesediaan merelakan sebagian dari cita-cita mereka untuk kepentingan bersama sebagaimana menyatukan multikultural dari Sabang sampai Merauke di mana semua suku, ras, umat beragama dan komunitas budaya dapat hidup bersama dengan baik, dengan kewajiban dan hak-hak yang sama tanpa harus melepaskan cita-cita dan keyakinan-keyakinan masing-masing.<sup>21</sup>

Dari perdebatan di sekitar sila Ketuhanan di awal masa kemerdekaan, kita mewarisi sebuah kekayaan berupa paham negara demokratis bahwa Indonesia merupakan negara yang berpijak pada Pancasila. Ini berarti Indonesia bukan negara yang terpisah dari agama, tetapi tidak juga menyatu dengan agama.<sup>22</sup> Tidak hanya sila Ketuhanan, aspek kemajemukan dan masalah mayoritas minoritas sudah menjadi pertimbangan dalam perdebatan di sekitar sila keempat. Para pendiri bangsa menyadari bahwa kemajemukan Indonesia secara sosial budaya dan ekonomi memerlukan semangat kekeluargaan dalam mengatasi kesenjangan yang ada dengan menghadirkan demokrasi permusyawaratan.<sup>23</sup>

Demokrasi permusyawaratan sebenarnya mendahului model demokrasi deliberatif yang dikenalkan Joseph M. Bessette pada 1980 dan kemudian dikembangkan oleh Jurgen Habermas. Pendek kata, demokrasi ini lebih menekankan pada daya-daya konsensus (mufakat) dalam semangat kekeluargaan. Yang dihindari bukan saja dikte-dikte golongan mayoritas, melainkan minoritas dari oligarki elit penguasa dan pengusaha. Dengan kata lain, demokrasi ini tidak mengikuti mayorokrasi dan minorokrasi.<sup>24</sup>

Gagasan Sunarko demikian selaras dengan ungkapan A. Eddy Kristiyanto dan William Chang berkenaan akar prinsip multikulturalisme. Prinsip ini menjunjung tinggi perlindungan hak setiap pribadi yang adil dan tidak diskriminatif. Nilai-nilai dasar dalam setiap kultur dihargai dan dikembangkan dengan serempak dalam sebuah masyarakat majemuk, sekalipun kultur itu dimiliki oleh sekelompok kecil masyarakat (minoritas).<sup>25</sup> Kemudian dalam pengembangannya di dunia pemerintahan, pemerintah perlu memiliki sikap yang adil, tegas, dan jelas sehingga tidak mengundang kehidupan konflik yang dapat memecah belah persaudaraan dalam satu bangsa.<sup>26</sup>

Berpijak pada refleksi demikian, saya melihat harusnya agama dan ruang publik di Indonesia memang tidak boleh dipandang semata adanya dominasi agama terhadap ruang publik. Ini dikarenakan Indonesia memang bukan negara berbasis agama tertentu, melainkan Pancasila. Pada praktiknya, agama dan ruang publik tentu perlu memperhatikan keberagaman dan kekayaan multikultural yang ada di Indonesia. Semua dilakukan dengan tidak berfokus ke agama tertentu dan terlebih bersifat diskriminatif padanya.

### **Rasionalitas Iman**

Berbagai peta konteks masyarakat demokratis multikultural melahirkan pertanyaan reflektif berupa: Kendati prinsip-prinsip dasar yang sedemikian bagus, mengapa masih muncul masalah sebagaimana yang diangkat komisi HAK serta Wahid Institute di atas? Mengapa kelompok agama terbukti mudah tergoda campur tangan terlalu jauh dalam ruang publik? Dua pertanyaan itu coba diangkat dan dijawab Sunarko bahwa ajaran normatif agama-agama perlu menolak kekerasan dan pemaksaan. Ini termasuk kelindannya dengan

---

<sup>21</sup> Sunarko, "Rasionalitas Iman Dan Masyarakat Demokratis Multikultural," 30.

<sup>22</sup> Sunarko, "Rasionalitas Iman Dan Masyarakat Demokratis Multikultural," 31.

<sup>23</sup> Sunarko, "Rasionalitas Iman Dan Masyarakat Demokratis Multikultural," 31.

<sup>24</sup> Sunarko, "Rasionalitas Iman Dan Masyarakat Demokratis Multikultural," 32.

<sup>25</sup> Eddy Kristiyanto and William Chang, "Sebuah Catatan Pembuka," in *Multikulturalisme: Kekayaan Dan Tantangannya Di Indonesia*, ed. Eddy Kristiyanto and William Chang (Jakarta: Obor, 2014), xii.

<sup>26</sup> Kristiyanto and Chang, "Sebuah Catatan Pembuka," xii.

penelusuran faktor sosial, politis, budaya, ekonomi yang dapat mendorong orang beragama yang bertindak diskriminatif dan kekerasan kepada pihak lain.<sup>27</sup>

Mengikuti F. Budi Hardiman, A. Sunarko memetakan di dalam masyarakat yang terglobalisasi secara ekonomis, kekuatan-kekuatan pasar kapitalis bersifat destruktif bagi solidaritas sosial. Ini termasuk fanatisme agama kerap merupakan respons atas krisis solidaritas dan marginalisasi yang ditimbulkan oleh ekspansi pasar kapitalis itu.<sup>28</sup> Khususnya bagi mereka yang secara politis, ekonomis, dan sosial terancam, agama justru dapat memberi perasaan positif tentang identitas. Tanpa menyangkal peran faktor-faktor lain, dari pihak kaum beragama sendiri dituntut sebuah proses belajar tertentu agar dapat menempatkan diri dalam tatanan masyarakat demokratis dan plural secara tepat.<sup>29</sup>

Bagi agama-agama monoteistik, dua pertanyaan reflektif yang diajukan Paul Budi Kleden perlu diperhitungkan. Pertama, masih adakah tempat bagi agama dalam penyelenggaraan kehidupan bersama dalam satu masyarakat yang pluralistik? Kedua, apakah rasionalitas agama masih dapat dipromosikan secara rasional dalam satu sistem politik liberal yang menuntut kekuasaan politik untuk bersikap netral terhadap semua pandangan hidup?<sup>30</sup> Dua pertanyaan reflektif ini memungkinkan pemahaman bahwa persoalan dimensi politis dari agama dan teologi sebenarnya merupakan masalah inti dari rasionalitas agama dan teologi sendiri dalam dunia.<sup>31</sup> Sejauh mana agama dan teologi sanggup bergema di ruang politik.

Mengikuti Jurgen Habermas, Sunarko menuangkan adanya tiga posisi epistemis yang harus dipegang. Pertama, warga beragama harus menentukan posisi epistemis yang tepat berhadapan dengan kenyataan plural agama serta berbagai pandangan hidup. Ini dapat dikatakan berhasil jika warga beragama secara sadar mampu menunjukkan keterkaitan pandangan-pandangan religiusnya dengan agama dan keyakinan lain tanpa mengorbankan klaim berkenaan kebenaran dari agama atau keyakinannya sendiri.<sup>32</sup> Kedua, warga beragama harus menemukan posisi epistemis yang tepat berhadapan dengan otoritas ilmu pengetahuan. Proses ini dikatakan berhasil jika mereka dapat merumuskan hubungan antara isi dogmatis agamanya dengan pengetahuan sekular sedemikian rupa sehingga tidak terjadi pertentangan antara hasil kemajuan ilmu pengetahuan dengan pandangan berdasarkan iman mengenai hal yang bersangkutan.<sup>33</sup> Ketiga, warga beragama harus memiliki sikap yang tepat terhadap prinsip bahwa yang berlaku dalam dunia politik yaitu argumen-argumen yang sekular, berdasarkan akal budi dan dapat dimengerti oleh semua pihak.<sup>34</sup>

Sunarko mengingatkan bila ketiga posisi epistemis tersebut dimiliki, kaum beragama dapat menerjemahkan visi dan bahasa keagamaannya ke dalam bahasa universal yang dapat dipahami setiap warga negara. Dalam deliberasi yang mendahului pengambilan keputusan politik, kontribusi-kontribusi kelompok agama perlu diterjemahkan dari bahasa religius partikular ke yang dapat diterima publik. Jika tidak, komunikasi akan terhambat dalam kekacauan Babilonia mengingat ada banyak bahasa komunal partikular yang belum tentu dipahami oleh orang dari kelompok dan tradisi budaya dan agama lain.<sup>35</sup>

---

<sup>27</sup> Sunarko, "Rasionalitas Iman Dan Masyarakat Demokratis Multikultural," 32.

<sup>28</sup> Sunarko, "Rasionalitas Iman Dan Masyarakat Demokratis Multikultural," 33.

<sup>29</sup> Sunarko, "Rasionalitas Iman Dan Masyarakat Demokratis Multikultural," 34.

<sup>30</sup> Sunarko, "Rasionalitas Iman Dan Masyarakat Demokratis Multikultural," 34.

<sup>31</sup> Sunarko, "Rasionalitas Iman Dan Masyarakat Demokratis Multikultural," 34.

<sup>32</sup> Sunarko, "Rasionalitas Iman Dan Masyarakat Demokratis Multikultural," 35.

<sup>33</sup> Sunarko, "Rasionalitas Iman Dan Masyarakat Demokratis Multikultural," 35.

<sup>34</sup> Sunarko, "Rasionalitas Iman Dan Masyarakat Demokratis Multikultural," 35.

<sup>35</sup> Sunarko, "Rasionalitas Iman Dan Masyarakat Demokratis Multikultural," 36.

Sunarko juga memahami bahwa kesulitan banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, ialah transposisi solidaritas prapolitis menjadi solidaritas politis tidak berlangsung tuntas dan mereka yang kalah dalam politik nasional kembali mencari perlindungan dan rasa aman dalam solidaritas komunal yang pra politis dalam kelompok budaya masing-masing.<sup>36</sup> Dalam kondisi demikian, para pembuat keputusan politis dalam ruang publik akan membuat keputusan terhadap argumen-argumen religius, tetapi prinsip netralitas agama berkaitan dengan pandangan hidup dan agama yang plural berpotensi dilanggar. Ini berdampak pada kemungkinan politik dan rencana undang-undang tertentu memperoleh suara mayoritas berdasarkan keyakinan religius tertentu pula.<sup>37</sup>

Berporos pada gagasan yang disampaikan Sunarko, saya sepakat bahwa rasionalitas iman menjadi terobosan dalam membangun kehidupan bermasyarakat demokratis multikultural. Ini didasarkan tidak semata membabibutkan agama sehingga memungkinkan adanya penindasan pada pemeluk lain, melainkan menerima keberagaman yang ada secara rasional. Namun, sikap ini tidak boleh dipahami sebagai bentuk baru dari relativisme yang mana menganggap bahwa semua relatif sehingga susah mencari mana yang harus dipegang. Rasionalitas iman bisa menolong masyarakat meletakkan agama mampu bekerja secara terbuka dan solider di ruang publik.

### **Gereja dalam Aksi**

Rasionalitas iman memang menjadi jalan mengembangkan kehidupan agama di ruang publik. Namun, ini menyisakan titik pergulatan pergumulan gereja dalam beraksi. Lantas, bagaimana gereja seharusnya beraksi dalam masyarakat demokratis multikultural? Kiprah ini berkenaan dengan tiga posisi epistemis di atas. Sunarko menunjukkan posisi epistemis pertama berkaitan dengan sikap terhadap kenyataan plural agama serta berbagai pandangan hidup lainnya. Proses ini dikatakan berhasil bila warga beragama secara sadar mampu menunjukkan keterkaitan pandangan religiusnya dengan agama dan keyakinan lain tanpa mengorbankan klaim tentang kebenaran dan agamanya sendiri.<sup>38</sup>

Dalam konteks gereja Katolik, Sunarko mendasarkan pada dua dokumen yang dihasilkan dari Konsili Vatikan II yaitu *Nostra Aetate* dan *Ad Gentes*. Rangkuman penting berkenaan isu ini dibahas Sunarko dalam tiga hal penting. Pertama, dokumen-dokumen Vatikan II berbicara tentang kemungkinan keselamatan bagi semua orang yang berkehendak baik dan hidup sesuai dengan tuntunan yang diberikan pada mereka. Vatikan II juga memberi penjelasan tentang bagaimana hal ini dapat terjadi yaitu dengan menegaskan karya Roh Kudus yang menguniversalkan misteri Paskah Kristus sehingga menyentuh semua orang.<sup>39</sup> Kedua, berkenaan dengan hubungan antara gereja dan agama-agama lain, kita menemukan ciri kontinuitas dan diskontinuitas dalam teks-teks Vatikan II. Gereja memang tidak menolak kebenaran di agama lain. Gereja merenungkan cara-cara bertindak dan hidup, kaidah-kaidah, serta ajaran-ajaran yang memang dalam banyak hal berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkannya sendiri.<sup>40</sup> Gereja tiada hentinyaewartakan kasih Kristus melalui jalan, kebenaran, dan hidup dalam Dia. Ketiga, apa yang baik dan benar dalam berbagai agama dipandang sebagai *preparatio evangelica* sebagai persiapan bagi

---

<sup>36</sup> Sunarko, "Rasionalitas Iman Dan Masyarakat Demokratis Multikultural," 37.

<sup>37</sup> Sunarko, "Rasionalitas Iman Dan Masyarakat Demokratis Multikultural," 38.

<sup>38</sup> Sunarko, "Rasionalitas Iman Dan Masyarakat Demokratis Multikultural," 38.

<sup>39</sup> Sunarko, "Rasionalitas Iman Dan Masyarakat Demokratis Multikultural," 38–39.

<sup>40</sup> Sunarko, "Rasionalitas Iman Dan Masyarakat Demokratis Multikultural," 39.

kepenuhan Injil. Misi tetap diperlukan tetapi dengan rendah hati dan penghargaan pada agama dan budaya lain.<sup>41</sup>

Posisi epistemis kedua berkaitan dengan sikap terhadap otoritas ilmu pengetahuan. Proses ini dikatakan berhasil apabila kaum beragama mampu merumuskan hubungan antara isi dogmatis agamanya dengan pengetahuan sekular. Ini membuat tidak terjadi pertentangan antara hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan pandangan berdasarkan iman mengenai hal yang bersangkutan. Sunarko mendasarkan pada dokumen '*Gaudium et Spes*. Otonomi hal-hal duniawi tidak berarti seolah ciptaan tidak tergantung dari Allah. Tidak sekedar mengakui otonomi dan otoritas ilmu pengetahuan, gereja juga mengakui bahwa ia menerima banyak manfaat dari perkembangan pesat yang dicapai dalam ilmu pengetahuan.<sup>42</sup>

Selain dokumen '*Gaudium et Spes*, Sunarko juga mendasarkan pada dokumen *Dei Verbum*. Dokumen itu berkenaan makna kebenaran yang terkandung dalam Kitab Suci serta bagaimana Kitab Suci harus ditafsirkan.<sup>43</sup> Kebenaran di sini berimplikasi pada pemahaman bahwa Kitab Suci sebagai kebenaran yang menjadi porosnya, bukan matematika, fisika, ilmu geografi, dan sebagainya. Meski demikian, kebenaran Kitab Suci digali dengan tidak melalui penafsiran harafiah dan fundamentalis. Ini dilakukan guna mencegah dari bahaya konflik yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan.

Posisi epistemis ketiga berkaitan dengan sikap yang tepat terhadap prinsip bahwa yang berlaku dalam dunia politik adalah argumen-argumen berdasarkan akal budi dan dapat dimengerti oleh semua pihak. Proses ini berhasil apabila kaum beragama mampu mengintegrasikan prinsip egaliter atau kesetaraan masing-masing individu serta moral universal ke dalam konteks doktrin agamanya yang menyeluruh.<sup>44</sup> Berkaitan dengan posisi ini, setelah sebelumnya menolak hak kebebasan beragama dan menerimanya sebagai keburukan yang hanya pantas ditoleransi demi sesuatu yang lain yang lebih penting, pernyataan Vatikan II mengenai kebebasan beragama dapat dipandang sebagai pembalikan kopernikan dalam sikap gereja Katolik.<sup>45</sup>

Hak kebebasan beragama tidak dilihat hanya sebagai sesuatu yang ditemukan oleh gereja, melainkan secara eksplisit ditegaskan sebagai sesuatu yang berakar dalam martabat pribadi manusia.<sup>46</sup> Hak kebebasan beragama adalah hak asasi yang dimiliki setiap orang terlepas dari keyakinan agama, asal usul etnis apapun. Kebebasan beragama di satu pihak dipandang sesuai dengan iman Kristen.<sup>47</sup> Namun, hak itu dimiliki tidak karena seseorang beragama Kristiani, melainkan ia manusia. Dengan kata lain, tuntutan dari posisi epistemis ketiga dipenuhi prinsip egaliter atau kesetaraan masing-masing individu serta prinsip moral universal berhasil diintegrasikan ke dalam konteks doktrin Kristen.<sup>48</sup>

Gagasan Sunarko di atas memang menggunakan gambaran gereja Katolik sebagai konteksnya. Bagi saya, ini bukan masalah. Gereja Protestan diharapkan turut mengembangkannya dengan mempertimbangkan kontekstualisasi dan karakteristik Protestan. Berpijak pada tiga epistemis tersebut, ini bisa diartikan berikut. *Pertama*, posisi epistemis pertama berkaitan dengan sikap terhadap kenyataan plural agama serta berbagai pandangan hidup

<sup>41</sup> Sunarko, "Rasionalitas Iman Dan Masyarakat Demokratis Multikultural," 39–40.

<sup>42</sup> Sunarko, "Rasionalitas Iman Dan Masyarakat Demokratis Multikultural," 41.

<sup>43</sup> Sunarko, "Rasionalitas Iman Dan Masyarakat Demokratis Multikultural," 42.

<sup>44</sup> Sunarko, "Rasionalitas Iman Dan Masyarakat Demokratis Multikultural," 43.

<sup>45</sup> Sunarko, "Rasionalitas Iman Dan Masyarakat Demokratis Multikultural," 64.

<sup>46</sup> Sunarko, "Rasionalitas Iman Dan Masyarakat Demokratis Multikultural," 44.

<sup>47</sup> Sunarko, "Rasionalitas Iman Dan Masyarakat Demokratis Multikultural," 44.

<sup>48</sup> Sunarko, "Rasionalitas Iman Dan Masyarakat Demokratis Multikultural," 45.



lainnya. Dalam Protestan, ini bisa dilandaskan pada pemahaman dialog antar agama. Dari segi penelusuran sejarah, A. Sukamto memetakan orang Protestan aliran ekumenis perlu belajar dari Walter Bonar Sidjabat (era 1960-an), Victor I. Tanja (era 1970-an sampai 1980-an), dan Th. Sumartana (era 1990-an sampai 2000-an).<sup>49</sup> Saya sepakat dengan tokoh-tokoh penting yang disebut Sukamto tersebut sebagaimana telah menunjukkan kiprahnya.

Kedua, posisi epistemis kedua berkaitan dengan sikap terhadap otoritas ilmu pengetahuan. Pemahaman ini tentu menggiring pada sikap dialog dan integrasi dalam relasi agama dan ilmu pengetahuan. Dialog berarti menghubungkan agama dan ilmu pengetahuan dengan mencakup mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seputar batas dan kesejajaran metodologi.<sup>50</sup> Kitab Suci, pengalaman religius, dan liturgi digunakan untuk agama. Data empiris digunakan untuk ilmu pengetahuan. Kemudian, hasil tersebut didialogkan.<sup>51</sup> Kemudian, integrasi berarti adanya pertemuan antara agama dan ilmu pengetahuan secara sintesis, sehingga menghasilkan kajian baru. Tujuan sintesis di sini berupaya menggabungkan keduanya dalam suatu kerangka tunggal.<sup>52</sup> Melalui cara demikian, konsep ruang, waktu, materi, kausalitas, pikiran, roh, dan Allah telah digunakan secara sintesis dalam teori dan penelitian teologis maupun ilmiah. Contoh model ini yakni lahirnya teologi natural.<sup>53</sup>

Ketiga, Posisi epistemis ketiga berkaitan dengan sikap yang tepat terhadap prinsip bahwa yang berlaku dalam dunia politik adalah argumen-argumen berdasarkan akal budi dan dapat dimengerti oleh semua pihak. Pemahaman ini tentu menggiring pada beragam refleksi spiritualitas politik yang bisa muncul dan tergali. Spiritualitas politik bisa menjadi ruang menyikapi problematika aktual di masyarakat, salah satunya terorisme yang turut menantang kehidupan masyarakat demokratis multikultural. Spiritualitas politik bisa dikemas berupa mewujudkan iman yang sekular, mengusung nilai-nilai moral dan mediasi politik, mencintai keadilan dan perdamaian, mengabdikan kepentingan umum, dan berkuasa melalui pelayanan dan kasih.<sup>54</sup>

### **Konstruksi Misiologi dalam Rasionalitas Iman di Masyarakat Demokratis Multikultural**

Setelah menyimak berbagai rangkaian diskusi di atas, kini kita tiba di bagian merancang konstruksi misiologi dalam rasionalitas iman di masyarakat demokratis multikultural. Guna membahas dan mendiskusikannya, saya menawarkan dua pokok utama. Pertama, misiologi mendorong partisipasi gereja mengupayakan penerimaan dan berkarya dalam keberagaman. Keberagaman merupakan ciri khas dan hal mendasar dari demokratis multikultural. Ini tentu menuntun gereja untuk berpartisipasi secara nyata dalam masyarakat. Keberagaman bukan sesuatu yang perlu ditentang atau diubah menjadi tunggal, melainkan diterima dan dirayakan dalam karya. Penerimaan dan karya bisa berupa merancang berbagai kegiatan pelayanan yang memungkinkan adanya dialog dan integrasi dalam keberagaman. Dialog dan integrasi bisa melibatkan semua agama dan budaya yang beragam di

---

<sup>49</sup> A. Sukamto, "Teologi Kristen Protestan Terhadap Agama-Agama Lain Di Indonesia 1966-1990," *Religió: Jurnal Studi Agama-Agama* 9, no. 2 (2019): 201-209.

<sup>50</sup> Paulus Eko Kristianto, "Menelusuri Jejak Dan Upaya Menghubungkan Sains Dan Agama," *Kurios: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 4, no. 2 (2018): 121.

<sup>51</sup> Kristianto, "Menelusuri Jejak Dan Upaya Menghubungkan Sains Dan Agama," 121-122.

<sup>52</sup> Kristianto, "Menelusuri Jejak Dan Upaya Menghubungkan Sains Dan Agama," 122.

<sup>53</sup> Kristianto, "Menelusuri Jejak Dan Upaya Menghubungkan Sains Dan Agama," 122.

<sup>54</sup> Paulus Eko Kristianto, "Persinggungan Agama Dan Politik Dalam Teror: Menuju Terbentuknya Teologi Spiritualitas Politik Dalam Konteks Maraknya Terorisme Di Indonesia," *Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 3, no. 1 (2018): 18-21.

tengah masyarakat demokratis multikultural. Sebagai contoh, gereja bisa bekerja sama dengan tempat ibadah atau pemeluk yang lain untuk bahu-membahu mengatasi persoalan kekerasan agama dan radikalisme yang menjadi tantangan nyata dalam masyarakat demokratis multikultural. Gereja tidak perlu sombong hadir layaknya pahlawan yang mampu mengatasi semua masalah. Justru, gereja harus jujur dan terbuka pada yang lain untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah itu.

Kedua, misiologi memungkinkan iman bekerja secara rasional dan terbuka pada mereka yang berbeda dengan kita. Iman yang rasional tidak bersifat fanatik dan memandang dirinya sebagai sosok yang paling benar, melainkan menghargai adanya kebenaran yang lain. Namun, ini juga tidak berarti adanya pemahaman yang relatif. Menghargai kebenaran yang lain berarti tidak menghakimi mereka, tetapi mau bergerak pada keterbukaan kalau setiap iman memiliki jalannya masing-masing secara unik. Keunikan itu menjadi ruang penerimaan dan terbuka. Rasionalitas iman dalam misiologi mendorong iman yang bergerak dinamis. Ini berarti setiap perjumpaan dengan yang lain bukan melemahkan, tetapi malah memperkaya pertumbuhan dan perkembangan iman yang dimiliki. Bagaimana tidak, setiap pertanyaan dan refleksi yang hadir mendorong kita mampu bergerak terus mempertajam dan menguatkan iman yang dipegang. Ini justru tidak membuat kita kehilangan iman dan bertentangan dengan mereka. Saya menyadari sikap ini sungguh dapat terselenggara apabila penerimaan menjadi bagian nyata dalam kehidupan beriman.

Dalam mewujudkan konstruksi misiologi dalam rasionalitas iman di masyarakat demokratis multikultural, kita perlu mempertajamnya dengan menanyakan bagaimana bila berhadapan dengan keberagaman agama yang tidak disikapi dengan baik sehingga menimbulkan konflik. Guna mengatasinya, saya menimbang misiologi perlu berkelindan dengan manajemen konflik. William Chang menunjukkan manajemen konflik sebenarnya berusaha mengidentifikasi dan menangani konflik dengan cara yang peka, adil, dan efisien.<sup>55</sup> Konflik perlu ditangani dengan menerapkan sistem komunikasi yang efektif, penyelesaian masalah dengan baik dan perundingan dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan pihak yang terlibat konflik.<sup>56</sup> Pada prosesnya, berbagai cara tanpa kekerasan perlu ditempuh untuk menghadapi dan memecahkan konflik.

William Chang menunjukkan setidaknya ada delapan hal yang bisa dilakukan guna mengembangkan manajemen konflik. Pertama, pemetaan masalah. Chang menunjukkan pemetaan masalah bisa dikerjakan dengan adanya pengajuan empat pertanyaan mendasar: Apa masalah yang sebenarnya terjadi? Siapa yang terlibat di dalamnya? Mengapa bisa terjadi? Akibat-akibatnya apa?<sup>57</sup> Dalam masyarakat demokratis multikultural, pertanyaan tersebut tentu perlu diperkaya dan terus ditanyakan guna membangun kekayaan refleksi. Tentunya, ini bisa memungkinkan adanya penyingkiran pandangan-pandangan apriori yang bisa saja mengurangi obyektivitas masalah.

Kedua, kumpulkan informasi. Chang menunjukkan informasi selengkap mungkin bisa membantu proses penyelesaian konflik karena informasi yang memadai bisa menolong hadirnya penggalian akar konflik yang sesungguhnya. Sekurangnya, proses ini berupa kembalinya ke latar belakang masalah, faktor pemicu, penyebab dan pihak-pihak yang bersembunyi di balik konflik.<sup>58</sup> Pada praktiknya, informasi harus lengkap dan tidak boleh

---

<sup>55</sup> William Chang, "Merajut Manajemen Konflik," in *Multikulturalisme: Kekayaan Dan Tantangannya Di Indonesia*, ed. Eddy Kristiyanto and William Chang (Jakarta: Obor, 2014), 102.

<sup>56</sup> Chang, "Merajut Manajemen Konflik," 102.

<sup>57</sup> Chang, "Merajut Manajemen Konflik," 104.

<sup>58</sup> Chang, "Merajut Manajemen Konflik," 105.

sepotong-potong. Informasi yang sepotong-potong sering kali miskin dan membuat kita tidak sanggup menemukan jalan keluar terbaik yang dapat diterima semua pihak yang sedang berkonflik.<sup>59</sup> Oleh karenanya untuk menghindari diperolehnya informasi yang sepotong-potong, kita perlu memiliki kepekaan adanya masalah ketika menghimpun informasi yaitu diperjuangkannya nilai kebenaran dan kejujuran sebuah informasi.<sup>60</sup> Dalam masyarakat demokratis multikultural, saya menimbang informasi yang lengkap menjadi hal penting agar kejelasan dan kebenaran informasi sungguh terjadi. Jika tidak, ini bisa mendorong lahirnya konflik sebagai sikap atas keberagaman yang kurang memadai.

Ketiga, penegakan keadilan. Chang menunjukkan keadilan di sini berkelindan dengan kecepatan dan proporsionalitas penegakan hukum positif yang berdampak pada seluruh proses penanganan konflik.<sup>61</sup> Dalam konteks penanganan konflik, ketidakadilan dalam penerapan hukum positif dapat mengundang suasana konflik yang tidak kondusif. Oleh karenanya, guna mengatasi konflik, penerapan hukum perlu dikerjakan secara adil.<sup>62</sup> Tidak hanya perihal mengatasi konflik, dalam masyarakat demokratis multikultural, penegakan hukum positif yang adil perlu menjadi urgensi terus diupayakan. Ini terjadi khususnya ketika penegakan keadilan dan mengatasi ketidakadilan yang berkelindan dengan berbagai persoalan keberagaman.

Keempat, *win-win solution*. Chang menunjukkan hal ini bisa dipahami pihak yang bertikai diperlakukan sebagai pihak-pihak yang berada pada posisi yang memiliki kebenarannya sendiri. Mereka berada pada posisi setara dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.<sup>63</sup> Perundingan ini mengacu pada prinsip keadilan yang tidak berat sebelah. Jika masih ada pihak yang belum bisa menerima keadaan, perundingan masih perlu dilakukan.<sup>64</sup> Bahkan, dalam keadaan tegang dan dipandang perlu, pihak ketiga yang netral perlu dihadirkan. Pihak ketiga perlu berperan sebagai mediator yang tidak berpihak dan memberikan jalan keluar bagi kedua belah pihak.<sup>65</sup> Dalam prosesnya, kelapangan dada dan keterbukaan hati diperlukan untuk menemukan jalan keluar yang dapat menghindari kerugian di salah satu pihak. Dalam masyarakat demokratis multikultural, saya menimbang *win-win solution* perlu dilakukan guna tetap menjaga kesetaraan di antara kedua belah pihak dan mediator perlu dihadirkan bila konflik yang tidak setara terjadi.

Kelima, hindari kata-kata panas. Chang menunjukkan ini dimaksudkan mengupayakan kata-kata yang bernada sejuk, merendah, memaafkan, dan saling pengertian guna mencapai perdamaian.<sup>66</sup> Sikap arogan dan sombong dalam perundingan perlu dikendalikan dengan sangat arif karena kedua ini dapat mendatangkan dampak negatif dalam seluruh proses perundingan dan pencapaian damai.<sup>67</sup> Perundingan yang berlangsung seharusnya tidak lagi hanya terbatas pada kata-kata, melainkan mengandalkan hati dan pikiran sehat. Dalam hal ini, perundingan membutuhkan niat baik dan tulus sehingga manusia dapat mencapai solusi yang meredakan ketegangan dan mengatasi salah paham antar pihak yang bertikai.<sup>68</sup> Dalam masyarakat demokratis multikultural, saya menimbang upaya ini berbuah

---

<sup>59</sup> Chang, "Merajut Manajemen Konflik," 105.

<sup>60</sup> Chang, "Merajut Manajemen Konflik," 105.

<sup>61</sup> Chang, "Merajut Manajemen Konflik," 105.

<sup>62</sup> Chang, "Merajut Manajemen Konflik," 106.

<sup>63</sup> Chang, "Merajut Manajemen Konflik," 107.

<sup>64</sup> Chang, "Merajut Manajemen Konflik," 107.

<sup>65</sup> Chang, "Merajut Manajemen Konflik," 107.

<sup>66</sup> Chang, "Merajut Manajemen Konflik," 108.

<sup>67</sup> Chang, "Merajut Manajemen Konflik," 108.

<sup>68</sup> Chang, "Merajut Manajemen Konflik," 108.

baik khususnya ketika terjadi perundingan yang terjadi di tengah konflik. Bagaimanapun, kata-kata panas sebenarnya tidak menyelesaikan masalah tetapi malah memperkeruhnya.

Keenam, membangun jembatan komunikasi. Chang menunjukkan jembatan komunikasi dibangun berdasarkan keterbukaan hati dari pihak yang bertikai guna menyelesaikan masalah konflik dalam suasana kekeluargaan, persaudaraan, dan kerja sama yang baik.<sup>69</sup> Komunikasi ini melibatkan seluruh kepribadian manusia karena tidak hanya bersifat verbal, melainkan personal dan dialogal.<sup>70</sup> Pintu dialog menjadi jalan utama masuk ke dalam komunikasi dari hati ke hati. Komunikasi ini tidak lagi menyembunyikan sejumlah agenda terselubung karena dalam komunikasi dialogal disingkapkan segala bentuk perasaan yang mengganjal dalam hati. Tanpa keterbukaan demikian, komunikasi hanya bersifat formal dan tidak menjamin mutu kebenaran komunikasi.<sup>71</sup> Dalam masyarakat demokratis multikultural, saya menimbang komunikasi menjadi bagian penting menyelesaikan konflik yang mengandung sulitnya penerimaan dan diskusi di tengah keberagaman.

Ketujuh, kerja sama. Chang menunjukkan saling ketergantungan menjadi tanda kerja sama yang menguatkan strata sosial. Kekokohan dan kekuatan sosial justru terbina karena sistem atau jejaring kerja sama antar anggota masyarakat.<sup>72</sup> Kerja sama demikian merupakan hal yang sungguh dinanti karena adanya saling membutuhkan, memperkaya, menolong, dan meneguhkan. Nilai luhur perbedaan dijunjung tinggi dan tidak lagi dipandang sebagai sumber pertikaian antaranggota masyarakat.<sup>73</sup> Perbedaan perlu dihargai dan dirayakan bersama. Perbedaan menunjukkan keindahan berbagai ciptaan Tuhan. Keindahan perlu digali terus-menerus dalam proses memupuk kerukunan, kesejukan, dan kedamaian hidup bersama.<sup>74</sup> Dalam masyarakat demokratis multikultural, saya menimbang kerja sama menjadi bagian penting guna membangun saling ketergantungan antar anggota yang beragam. Ini bisa saling menghargai berbagai keindahan yang diperoleh dari Tuhan dan memberikan kontribusi satu sama lain.

Kedelapan, proyekisasi konflik. Chang menjelaskan proyekisasi konflik dalam arti terdapat pihak-pihak tertentu yang cenderung memperkeruh suasana guna memperoleh keuntungan di tengah kesulitan.<sup>75</sup> Dana-dana yang seharusnya ditujukan kepada korban konflik diselewengkan dengan berbagai macam cara, contohnya menahan sumbangan sampai waktu tertentu, memotong besarnya sumbangan, dan memperpanjang masa tinggal di kamp tahanan.<sup>76</sup> Kehadiran korban konflik sosial menjadi obyek perasan mereka yang memiliki kehendak jahat. Berpijak pada kondisi ini, penegak hukum dan keadilan perlu memiliki jaringan pemantauan yang teliti dan cermat sehingga bisa mengambil langkah-langkah yang antisipatif dan preventif sebelum tindakan-tindakan yang merugikan korban konflik sosial.<sup>77</sup> Dalam masyarakat demokratis multikultural, saya menimbang proyekisasi konflik perlu dipetakan dengan jeli. Ini dilakukan agar konflik yang berpotensi merusak keberagaman tidak terjadi berkepanjangan.

---

<sup>69</sup> Chang, "Merajut Manajemen Konflik," 109.

<sup>70</sup> Chang, "Merajut Manajemen Konflik," 109.

<sup>71</sup> Chang, "Merajut Manajemen Konflik," 109.

<sup>72</sup> Chang, "Merajut Manajemen Konflik," 110.

<sup>73</sup> Chang, "Merajut Manajemen Konflik," 110.

<sup>74</sup> Chang, "Merajut Manajemen Konflik," 110.

<sup>75</sup> Chang, "Merajut Manajemen Konflik," 111.

<sup>76</sup> Chang, "Merajut Manajemen Konflik," 112.

<sup>77</sup> Chang, "Merajut Manajemen Konflik," 112.

## KESIMPULAN

Masyarakat demokratis multikultural menjadi bagian konteks Indonesia yang mengandung berbagai problematika. Setiap bagian problematika tersebut perlahan perlu diurai dan diselesaikan. Salah satu alternatif menyelesaikannya yaitu melalui misiologi. Misiologi menjadi ruang mengupayakan mandat Tuhan yang diberikan dalam kehidupan bermasyarakat. Pada praktiknya, ini bisa saja berhadapan dengan beragam konflik. Konflik yang terjadi perlu dikelola melalui manajemen konflik. Ini sebabnya misiologi perlu berkecenderungan dengan manajemen konflik. Saya pun menyadari bahwa misiologi diharapkan bukan sebatas pada diskursus melainkan perlu diupayakan pada praktik. Oleh karenanya, saya mendorong pembaca bisa mengupayakan hadirnya penelitian berikutnya yang menguji, mengembangkan, dan menawarkan hal baru sebagaimana belum saya gali. Bagaimanapun, saya hanya mengerjakannya dari sisi konseptual saja sehingga tentu ada banyak kerumputan secara empiris.

## REFERENSI

- Budiman Harahap, Yoshua. "Demo(n)s Dan Kratos: Kritik Terhadap Praktik Demokrasi Dari Kacamata Kekristenan." *Kenosis: Jurnal Kajian Teologi* 6, no. 2 (2020).
- Chang, William. "Merajut Manajemen Konflik." In *Multikulturalisme: Kekayaan Dan Tantangannya Di Indonesia*, edited by Eddy Kristiyanto and William Chang. Jakarta: Obor, 2014.
- Fitriyah, Nur Laili. "Membangun Pembelajaran Demokratis Berwawasan Multikultural." *Madrasah: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Madrasah* 5, no. 1 (2012).
- Gruchy, John W. De. *Agama Kristen Dan Demokrasi: Suatu Teologi Bagi Tata Dunia Yang Adil*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006.
- Kirk, J. Andrew. *Apa Itu Misi?: Suatu Penelusuran Teologis*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999.
- Kristianto, Paulus Eko. "Menelusuri Jejak Dan Upaya Menghubungkan Sains Dan Agama." *Kurios: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 4, no. 2 (2018).
- — —. "Persinggungan Agama Dan Politik Dalam Teror: Menuju Terbentuknya Teologi Spiritualitas Politik Dalam Konteks Maraknya Terorisme Di Indonesia." *Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 3, no. 1 (2018).
- Kristiyanto, Eddy, and William Chang. "Sebuah Catatan Pembuka." In *Multikulturalisme: Kekayaan Dan Tantangannya Di Indonesia*, edited by Eddy Kristiyanto and William Chang. Jakarta: Obor, 2014.
- Prasisko, Yongky Gigih. "Demokrasi Indonesia Dalam Masyarakat Multikultural." *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter* 3, no. 1 (2019).
- Samongilailai, Aseng Yulias. "Visi Profetik Kehidupan Sosial Umat Kristen Dalam Demokrasi Menurut John W. De Gruchy." *Epigraphe: Jurnal Teologi dan Pelayanan Kristiani* 3, no. 2 (2019).
- Sukanto, A. "Teologi Kristen Protestan Terhadap Agama-Agama Lain Di Indonesia 1966-1990." *Religió: Jurnal Studi Agama-Agama* 9, no. 2 (2019).
- Sunarko, Adrianus. "Kristen-Katolik: Gereja Katolik Tentang Demokrasi." In *Agama Dan Demokratisasi: Kasus Indonesia*, edited by Simon Petrus Lili Tjahjadi. Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- Sunarko, Andrianus. "Rasionalitas Iman Dan Masyarakat Demokratis Multikultural." In *Multikulturalisme: Kekayaan Dan Tantangannya Di Indonesia*, edited by A. Eddy Kristiyanto and William Chang. Jakarta: Obor, 2014.